

ANALISIS PERAN DANA DESA (DD) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Roni Roberto Simanullang¹⁾, Wahyu Hamidi²⁾, Yusni Maulida²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-mail : roniroberto.95@gmail.com

Analysis Of the Role Of Village Fund (DD) on Proverty Levels In Riau Province

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village funds on poverty levels in districts / cities of Riau Province in 2015-2019 and to determine which districts are the most sensitive to village funds. This study uses secondary data in the form of panel data, namely 2015-2019 village funds and 2015-2019 poverty levels in Riau Province. Village fund data is obtained from DJPK.KEMENKEU, while poverty levels are obtained from the Central Statistics Agency of Riau Province 2015-2019. The analytical tools used in this research are SPSS and Elasticity. The results of this study indicate that partially the variable of the amount of village funds has a positive but insignificant effect on the poverty level in Riau Province in 2015-2019. This means that the greater the village funds provided, it actually increases the number of poor people in Riau Province, but the increase is not significant.

Keywords: Village Fund and Poverty Level

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin merata. Namun, pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Hal inilah yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan pembangunan secara merata.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam hidup, maka diperlukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi sehingga dapat mengatasi kemiskinan.

Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan

ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan (Rosalinda, 2014).

Tabel 1 Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun(ribuan)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kampar	34.212.473	151.159.631	192.408.524	184.890.565	209.669.588
Bengkalis	19.632.474	85.634.628	108.169.870	116.512.391	131.071.696
Indragiri Hilir	28.582.573	123.119.476	156.525.314	146.388.836	168.394.033
Indragiri Hulu	25.695.444	108.844.866	138.490.141	138.806.180	160.181.885
Pelalawan	15.301.781	66.400.280	84.403.526	89.441.056	104.309.775
Rokan Hulu	20.787.326	88.205.480	112.016.303	119.456.777	139.861.061
Rokan Hilir	22.952.672	102.916.528	130.582.811	125.915.910	143.289.390
Siak	17.611.484	77.108.631	97.934.922	96.873.113	111.240.674
Kuantan Singingi	31.469.701	130.621.773	166.211.742	152.877.498	171.266.766
K. Meranti	13.858.217	65.267.323	82.562.772	83.526.525	96.400.996
Kota Dumai	-	-	-	-	-
Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-

Sumber: *djpk.kemenkeu 2020*

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat rincian Dana Desa (DD) di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau periode 2015-2019. Tabel tersebut terdiri dari 10 kabupaten merupakan daerah yang menerima Dana Desa dan ada dua (2) kota yang sama sekali tidak menerima. Dalam catatan Kemenkeu perkembangan Dana Desa pada tahun 2015-2019 di Provinsi Riau secara umum menunjukkan trend yang positif, hal ini bisa dilihat pada tabel di atas. Jika kita lihat perkembangan Dana Desa yang ada di daerah ini maka Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten penerima Dana Desa tertinggi di Provinsi Riau lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 Kabupaten Kampar menerima dana desa sebesar Rp.209.669.588.000 merupakan angka tertinggi diantara kabupaten yang lainnya. Kemudian, diposisi tertinggi kedua diikuti Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp.171.266.766.000. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penerima dana desa

paling sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu sebesar Rp.96.400.996.000. Namun besarnya pengalokasian dana desa ini masih menyisakan penduduk miskin, hal ini bisa dilihat ditabel persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Provinsi Riau.

Salah satu masalah klasik dan hingga kini masih menjadi masalah bersama adalah kemiskinan. Hampir seluruh periode pemerintahan di Indonesia menempatkan kemiskinan sebagai isu pembangunan. Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensional, kemiskinan bukan hanya dipandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan ini. Tetapi lebih dari itu, kemiskinan juga dapat dipandang dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Provinsi yang kaya akan sumberdaya alamnya di bawah minyak bumi dan gas, di atas minyak kelapa sawit pada kenyataannya hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah ini.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun dalam Persentase (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kampar	8,68	9,17	8,38	8,02	8,18	7,71
2	Bengkalis	7,20	7,38	6,82	6,85	6,22	6,27
3	Indragiri Hilir	7,51	8,11	7,99	7,70	7,05	6,54
4	Indragiri Hulu	7,28	7,76	7,15	6,94	6,30	6,06
5	Pelalawan	11,15	12,09	11,00	10,25	9,73	9,62
6	Rokan Hulu	10,13	11,05	11,05	10,91	10,95	10,53
7	Rokan Hilir	7,28	7,67	7,97	7,88	7,06	7,01
8	Siak	5,22	5,67	5,52	5,80	5,44	5,03
9	Kuantan Singingi	10,75	10,80	9,85	9,97	9,92	9,56
10	Kepulauan Meranti	33,85	34,08	30,89	28,99	27,79	26,93
11	Kota Dumai	4,83	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56
12	Kota Pekanbaru	3,17	3,27	3,07	3,05	2,85	2,52

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020*

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau periode 2014-2019. Dengan adanya penjelasan di atas, menggambarkan bahwa jumlah

penduduk miskin di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau berbeda-beda hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap kabupaten berbeda-beda pula. Kabupaten Meranti merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi diantara kabupaten- kabupaten lainnya, dilihat dari tahun terakhir tingkat kemiskinan mencapai 26,93%. Kemudian diposisi tertinggi kedua diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu sebesar 10.53%, diposisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Pelalawan sebesar 9.62% diikuti dengan kabupaten lainnya. Sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis hampir sama rata sebesar 6.5%, sedangkan jumlah penduduk miskin dalam persentase paling sedikit adalah Kabupaten Siak yaitu sebesar 5.03%.

Pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi selama ini diyakini sebagai strategi pembangunan yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat akan mendorong pergerakan diberbagai sektor seperti meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, perumahan dan lain sebagainya. Dimana semua itu bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang mantap. Sementara itu, Provinsi Riau diusiaanya yang kini mencapai 62 tahun telah menjelma menjadi salah satu Provinsi kaya di Nusantara. Hampir semua kekayaan alam dimiliki Provinsi ini, di dalam perut buminya terkandung minyak bumi, batubara, emas, timah dan bahan tambang lainnya. Sementara di atasnya terhampar kekayaan hutan, perkebunan dan pertanian dalam arti luas. Ditinjau dari indikator yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penentuan rumah tangga miskin, faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Riau adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat

pengangguran, kesempatan kerja dan sebagainya.

Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Analisis Peran Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 241 tahun 2004 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa (DD) sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa (Riyani, 2016).

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian setiap negara, namun dalam porsi yang berbeda. Masalah ini pun tak luput dari salah satu negara berkembang yakni Indonesia.

Secara etimologis, "kemiskinan" berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2011) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Ada beberapa pengertian kemiskinan di Indonesia diberikan oleh

banyak ahli (Widodo, 2006) sebagai berikut :

- 1) Menurut Sajogyo kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan giji.
- 2) Emil Salim kemiskinan adalah keadaan pokok penduduk yang meliputi hal-hal yang tidak memiliki mutu tenaga kerja tinggi, jumlah modal yang memadai, luas tanah, sumber daya alam yang cukup, keaslian dan keterampilan yang tinggi, kondisi fisik dan rohaniah yang baik dan rangkuman hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan.
- 3) Soemitro Djoyohadikusumo mengemukakan bahwa kemiskinan ditandai dengan tingkat hidup rendah dan tertekan. Ini merupakan akibat dari keganjilan dan kepincangan yang terdapat pada pertimbangan keadaan dasar dan kerangka susunan masyarakat itu sendiri dan menyangkut beberapa masalah yaitu: (a) keadaan faktor produksi yangtersedia dalam masyarakat sebagai sumber produksi yang menyangkut sumber daya alam, modal, dan keterampilan; (b) kepincangan sebagai sektor ekonomi, modal dan pengangguran teknologi, dimasa lampau dilakukan paling intensif justru disektor-sektor yang terbatas yaitu sektor perkebunan dan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian bertempat di Provinsi Riau.

Atas pertimbangan bahwa Provinsi Riau yang merupakan salah satu provinsi kaya di Nusantara ini, hampir semua kekayaan alam ada di provinsi ini tapi belum mampu mengentas kemiskinan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dana Desa (DD) terhadap tingkat kemiskinan pada tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi dana desa, jumlah penduduk miskin, dan lain-lain. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah atau yang terkait seperti Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Riau, serta buku referensi dan kepustakaan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Adapun data tersebut berkaitan dengan:

- a. Rincian Dana Desa (DD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (tahun 2015-2019, dalam ribuan rupiah).
- b. Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau (tahun 2014-2019).

Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam menopang analisis masalah-masalah yang dikemukakan adalah data yang diterbitkan oleh:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau
- b. KEMENKEU
- c. Literatur-literatur yang mendukung serta data dari publikasi lainnya, baik yang bersifat siap pakai maupun data yang perlu diolah.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan di dalam

penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan informasi dengan jalan membaca, mempelajari dan membahas buku-buku ilmu pengetahuan, tulisan ilmiah serta bahan lain seperti jurnal, internet yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Menghimpun data sekunder, yakni data dan informasi yang telah dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait untuk tujuan penelitian dimana data yang dibutuhkan Dana Desa (DD), jumlah penduduk miskin dan lain-lain di Kabupaten Provinsi Riau periode 2015-2019.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Adapun variabel dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 241 tahun 2004 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa.

Dana Desa (DD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa (DD) sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan

diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

b) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian setiap negara, namun dalam porsi yang berbeda. Masalah ini pun tak luput dari salah satu negara berkembang yakni Indonesia.

Secara etimologis, "kemiskinan" berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2011) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Metode Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk panel. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau, peneliti menggunakan model analisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS. Untuk mengetahui kepekaan kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau peneliti menggunakan analisis Elastisitas yaitu melihat perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau

reaksi Dana Desa terhadap perubahan jumlah penduduk miskin dengan rumus :

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} \text{ atau } E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P}$$

$$E = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \times 100}{\frac{Y_2 - Y_1}{Y_1} \times 100}$$

$$E = \frac{\% \Delta DD}{\% \Delta JPM}$$

Keterangan :

ΔDD = perubahan jumlah Dana Desa (Rupiah)

ΔJPM = perubahan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

E = elastisitas

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013: 110). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov(1-sample K-S). Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah (Ghozali, 2013: 110) sebagai berikut :

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi syarat normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z(I-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2013: 111) sebagai berikut :

- Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Hal ini berarti ada data residual terdistribusi tidak normal.
- Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Analisis Regresi

Sederhana Regresi linier berganda menurut Djarwanto dan Subagyo (2009:309) yaitu untuk menentukan persamaan yang dapat menggambarkan hubungan lebih dari dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan linier, sebagai berikut : Pengaruh antara variabel dependent dengan variabel independent dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Djarwanto dan Subagyo, 2009:309):

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Dimana :

Y : Tingkat kemiskinan

X : Dana desa

a : Konstanta

b : Koefisien

e : error

a. Uji Parsial (t-test)

Menurut Sugiyono (2007:236) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) yang diuji secara individual. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu:

- Ho diterima bila $t \text{ hitung} \leq t \text{ table}$ dan nilai signifikan $t > 0,05$.
- Ho ditolak bila $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ dan nilai signifikan $t < 0,05$.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menurut digunakan untuk mengetahui proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan variabel bebas (X). Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan Dana Desa (DD)

Pada sub bab ini akan dijelaskan bagaimana peran Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Namun karena terbatasnya data tentang penggunaan Dana Desa dikarenakan bahwa Dana Desa baru bergulir mulai tahun 2015 maka dalam penelitian ini hanya akan membahas penggunaan Dana Desa ditahun 2015 hingga tahun 2019 kemudian akan dianalisis perannya terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu perkembangan Dana Desa di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Tabel 3 Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Kabupaten/ Kota	Tahun(ribuan)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kampar	34212473	15115 9631	19240 8524	18489 0565	209669588
Bengkalis	19632474	85634 628	10816 9870	11651 2391	131071696
Indragiri Hilir	28582573	12311 9476	15652 5314	14638 8836	168394033
Indragiri Hulu	25695444	10884 4866	13849 0141	13880 6180	160181885
Pelalawan	15301781	66400 280	84403 526	89441 056	104309775
Rokan Hulu	20787326	88205 480	11201 6303	11945 6777	139861061
Rokan Hilir	22952672	10291 6528	13058 2811	12591 5910	143289390
Siak	17611484	77108 631	97934 922	96873 113	111240674
KSingingi	31469701	13062 1773	16621 1742	15287 7498	171266766
KepMeranti	13858217	65267 323	82562 772	83526 525	96400996
Kota Dumai	-	-	-	-	-
Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
Prov. Riau	230.104.195	999.27 8.616	1.269. 305.92 5	1.254. 688.85 1	1.435685.8 64

Sumber: *djpk.Kemenkeu 2020*

Dari tabel 3 dapat dilihat rincian Dana Desa (DD) di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau periode 2015-2019.

Tabel tersebut terdiri dari 10 kabupaten merupakan daerah yang menerima dana desa dan ada dua (2) kota yang sama sekali tidak menerima. Dalam catatan Kemenkeu perkembangan dana desa pada tahun 2015-2019 di Provinsi Riau secara umum menunjukkan trend yang positif, hal ini bisa dilihat pada tabel di atas. Jika kita lihat perkembangan dana desa yang ada di daerah ini maka Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten penerima dana desa tertinggi di Provinsi Riau lima tahun terakhir . Pada tahun 2019 Kabupaten Kampar menerima dana desa sebesar Rp.209.669.588.000 merupakan angka tertinggi diantara kabupaten yang lainnya. Kemudian, diposisi tertinggi kedua diikuti Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp.171.266.766.000. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penerima dana desa paling sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu sebesar Rp.96.400.996.000. Namun besarnya pengalokasian dana desa ini masih menyisakan penduduk miskin, hal ini bisa dilihat ditabe jumlah penduduk miskin di Kabupaten Provinsi Riau. Berikut perkembangan jumlah dana desa dari tahun 2015-2019 menurut kabupaten/kota di provinsi Riau dalam bentuk persentase.

Tabel 4 Persentase Perkembangan Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Kabupaten/ Kota	Persentase Perkembangan Dana Desa (% Rupiah)					X̄ ribuan
	2016	2017	2018	2019		
Kuantn Singingi	315,1	27,25	-8,02	12,02		130.489.496
Indragiri Hulu	323,5	27,23	0,23	15,40		114.403.703
Indragiri Hilir	330,7	27,13	-6,48	15,03		124.602.046
Pelalawan	333,9	27,12	5,97	16,62		71.971.283
Siak	337,9	27,01	-1,09	14,9		80.153.764
Kampar	341,9	27,29	-3,91	13,5		154.468.156
Rokan Hulu	324,3	26,9	6,7	17,1		96.065.389
Bengkalis	336,2	26,3	7,7	12,5		92.204.211
Rokan Hilir	348,3	26,9	-3,57	13,7		105.131.462
Kep.Meranti	370,9	26,5	1,17	15,5		68.323.166
Pekanbaru	-	-	-	-		-
Dumai	-	-	-	-		-

Sumber : BPS dan Diolah 2020

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat persentase kenaikan dan penurunan

Dana Desa dari tahun 2015-2019 di kabupaten/kota Provinsi Riau. Dalam catatan Kemenkeu perkembangan dana desa pada tahun 2015-2019 di Provinsi Riau secara umum menunjukkan trend yang positif, hal ini bisa dilihat pada table di atas. Pada tahun 2016 jelas terlihat Dana Desa mengalami kenaikan tiga kali lipat bahkan lebih dari taun seblumny dan itu semua terjadi disetiap kabupaten di Provinsi Riau. Kemudian pada periode 2017 jumlah dana desa yang dianggarkan pemerintah juga mengalami kenaikan sekitar 26% per kabupaten. Akan tetapi ada yang berbeda pada periode tahun 2018 beberapa kabupaten yang menerima dana desa mengalami penurunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Siak, Kampar dan Rokan Hilir. Kemudian pada periode tahun 2018-2019 rincian dana desa naik lagi disetiap kabupaten sekitar 14%.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Tabel 5 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2019

No	Kabupaten/ Kota	Tahun (Jiwa)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	33520	34100	31220	31950	32100	31220
2	Indragiri Hulu	29400	31630	29730	26420	27220	26660
3	Indragiri Hilir	52390	56850	56820	55400	51420	48290
4	Pelalawan	42670	47530	45350	44400	44290	45980
5	Siak	22540	24810	24860	26830	25810	24490
6	Kampar	67610	72220	67680	66330	69320	66810
7	Rokan Hulu	58290	64740	67420	69240	72280	72210
8	Bengkalis	38820	40000	37490	38190	35110	35830
9	Rokan Hilir	46070	49130	52400	53190	48920	49800
10	Kep. Meranti	61070	61640	56180	53050	51170	49890
11	Pekanbaru	32290	33760	32490	33090	31620	28600
12	Dumai	13620	14970	13760	13530	11190	10950
-	Provinsi Riau	498.28	531.39	515.4	514.62	500.44	490.72
-	Persentase	-	6,7	-3,1	-0,15	-2,75	-1,94

Sumber : Data BPS dan Diolah 2020

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau periode 2014-2019. Dengan adanya penjelasan di atas, menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau hampir mengalami penurunan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2014

jumlah penduduk miskin sejumlah 498.280 jiwa sempat mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 531.390 jiwa. Kemudian pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 sejumlah 490.720 jiwa. Sesuai data BPS jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota jika ditotal dari tahun 2014-2019, Kabupaten Kampar menjadi daerah tertinggi angka kemiskinan yaitu mencapai 409.970 jiwa, disusul Kabupaten Rokan Hulu 404.180 jiwa dan di urutan ketiga ditempati Kabupaten kepulauan Meranti diangka 333.000 jiwa. Kemudian diposisi terakhir dengan jumlah angka kemiskinan terendah ditempati oleh Kabupaten Siak 149.340 jiwa.

Kemiskinan memang merupakan masalah kompleks yang dapat menyerang daerah manapun, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Provinsi yang kaya akan sumberdaya alam ini di bawah minyak bumi dan gas, di atas minyak kelapa sawit pada kenyataannya hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah ini. Banyak yang mengira masyarakat di Riau pasti jauh dari kemiskinan, kenyataannya Provinsi Riau juga tidak lepas dari masalah kemiskinan.. Berikut persentase perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2015-2019 menurut kabupaten/kota di provinsi Riau.

Tabel 6 Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Kabupaten/kota	Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (% Jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	(\bar{X}) jiwa
Kuantan Singingi	-8,5	2,33	0,46	-2,75	32.351
Indragiri Hulu	-6,1	-11,13	3,02	-2,05	28.510
Indragiri Hilir	-0,05	-2,49	-7,18	-6,08	53.528
Pelalawan	-4,58	-2,01	-0,33	3,81	45.036
Siak	0,2	7,9	-3,81	-5,11	24.890
Kampar	6,8	-1,99	4,51	-3,62	68.328
Rokan Hulu	4,13	2,7	4,39	-0,09	67.363
Bengkalis	-6,27	1,86	-8,06	2,05	37.573
Rokan Hilir	6,65	1,51	-8,02	1,79	49.918
Kepulauan Meranti	-8,85	-5,57	-3,54	-2,51	55.500
Pekanbaru	-3,76	1,84	-4,44	-9,55	31.975
Dumai	-8,08	-1,67	-17,29	-2,15	13.003

Sumber : Data BPS dan Olahan 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin dikabupaten/kota Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, meskipun ada beberapa kabupaten yang sempat mengalami kenaikan. Akan tetapi, penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak sebanding dengan kenaikan rincian dana desa yang diteima oleh setiap kabupaten/kota di provinsi Riau.

Hasil Pengujian Analisis Data

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dihasilkan residual yang berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	15139.18113
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.773
Asymp. Sig. (2-tailed)		.589

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengujian Data, 2020

Dari tabel 7 dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,589. Karena signifikansi (0,589) > taraf signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen yang dalam hal ini adalah

dana desa berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Pengujian regresi ini tidak hanya melihat berpengaruh signifikan atau tidak variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga dapat melihat arah dari pengaruh variabel tersebut. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1$$

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = 44.731,951 + 0,00002 \text{ Dana Desa}$$

Arti persamaan regresi diatas adalah:

- Nilai konstanta (a) sebesar 44.731,951. Artinya adalah apabila dana desa diasumsikan nol (0), maka jumlah penduduk miskin sebanyak 44.732 jiwa (dibulatkan).
- Nilai koefisien regresi variabel dana desa sebesar 0,00002. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan dana desa sebesar 1 milyar, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 20 orang dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen (dana desa) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan). Caranya adalah dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika t hitung < t tabel maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44731.951	4889.938		9.148	.000
Dana Desa	.00002	.000	.058	.406	.687

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dari Tabel 8 dapat dilihat masing-masing nilai t hitung dan signifikansi variabel bebas. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada alpha 5%) dengan dengan persamaan:

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= n - k - 1 : \alpha / \alpha \\ &= 50 - 1 - 1 : 0,05 / 2 \\ &= 48 : 0,025 \\ &= 2,011 \end{aligned}$$

Dengan demikian maka diketahui bahwa t hitung (0,406) < t table (2,011) atau signifikansi (0,687) > alpha (0,05). Artinya adalah dana desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi adalah untuk melihat persentase pengaruh variabel independen (dana desa) terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan). Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.058 ^a	.003	-.017	15296.06803

a. Predictors: (Constant), Dana Desa

b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dari Tabel 9 diperoleh nilai R² sebesar 0,003. Artinya adalah bahwa persentase pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 3%. Sedangkan sisanya sebesar 97% (100% - 3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Jumlah Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pembahasan Pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga 2019 yang diolah menggunakan program SPSS menunjukan hasil bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Angka koefisien regresi dana desa (X) sebesar 0,00002, artinya adalah setiap peningkatan dana desa sebesar 1 milyar, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 20 orang dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil penelitian mendapatkan bahwa ternyata dana desa memberikan memberikan dampak yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Semakin besar dana desa yang diberikan, ternyata meningkatkan penduduk miskin di Provinsi Riau.

Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dari pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin (Lestari, 2017).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, dananya ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Tujuan dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Penggunaan dana desa digunakan untuk

pemerintahan desa sebesar 30 persen dan 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana desa pada pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan analisis diatas, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.

Salah satu faktor belum efektifnya penyaluran dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau disebabkan karena masih banyak dijumpai masalah penggunaan dana desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran. Supaya dana desa bisa maksimal dan tepat sasaran, maka pemerintah desa harus mengenali, memetakan dan menginventarisir apa saja potensi ekonomi desa sesuai dengan sumberdaya yang ada di desa, selanjutnya dilakukan musyawarah desa untuk memutuskan apa saja usaha produktif yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa. Dengan demikian manfaat dari dana desa tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat desa, dan tujuan dari program dana desa dalam menekan angka kemiskinan dapat tercapai.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setianingsih pada tahun 2016, dengan judul “Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan”. Hasil dari penelitiannya adalah variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah dana desa, hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis yang menyatakan hanya variabel dana desa yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dari uji regresi data panel koefisien dana desa sebesar 1.10 mengandung arti kontribusi dana desa dalam menambah penduduk miskin sebesar 1.10%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan.

2. Kabupaten Yang Paling Peka Terhadap Dana Desa (DD)

Untuk mengetahui kepekaan kabupaten/kota terhadap dana desa di Provinsi Riau, peneliti menggunakan analisis Elastisitas yaitu melihat perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi perubahan jumlah penduduk miskin terhadap Dana Desa. Berikut hasil penghitungan nilai elastisitas masing-masing kabupaten/kota di provinsi Riau.

Tabel 10 Nilai Elastisitas Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun	Elastisitas(%)
Kuantan Singingi	2015-2016	-37,07
	2016-2017	11,69
	2017-2018	-17,43
	2018-2019	-4,37
Indragiri Hulu	2015-2016	-53,9
	2016-2017	-2,5
	2017-2018	0,075
	2018-2019	-7,51
Indragiri Hilir	2015-2016	-6614
	2016-2017	-11,07
	2017-2018	0,9
	2018-2019	-2,47
Pelalawan	2015-2016	-72,75
	2016-2017	-12,98
	2017-2018	-23,88
	2018-2019	4,27
Siak	2015-2016	1608,7
	2016-2017	3,41
	2017-2018	0,29

Kabupaten/Kota	Tahun	Elastisitas(%)
Kampar	2018-2019	-2,9
	2015-2016	50,27
	2016-2017	-13,8
	2017-2018	-0,87
Rokan Hulu	2018-2019	-3,7
	2015-2016	78,3
	2016-2017	9,9
	2017-2018	1,52
Bengkalis	2018-2019	-189,7
	2015-2016	-54,22
	2016-2017	14,1
	2017-2018	-0,95
Rokan Hilir	2018-2019	6,1
	2015-2016	51,9
	2016-2017	17,8
	2017-2018	0,45
Kepulauan Meranti	2018-2019	7,65
	2015-2016	-41,7
	2016-2017	-4,8
	2017-2018	-0,33
Pekanbaru	-	-
Dumai	-	-

Sumber: Data BPS dan Diolah 2020

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dana desa dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau. Berdasarkan hasil analisis elastisitas untuk menentukan kabupaten/kota yang mempunyai kepekaan tertinggi terhadap dana desa dilihat dari nilai elastisitasnya yang paling kecil. Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang paling mempunyai kepekaan terhadap dana desa disusul oleh kabupaten Indragiri Hilir diposisi ke dua. Kemudian diposisi ketiga ditempati oleh kabupaten Kuantan Singingi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengelolaan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian secara parsial variabel jumlah dana desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2015-2019. Hal ini berarti semakin besar dana desa yang diberikan, justru meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau,

namun peningkatannya tidak signifikan.

2. Hasil analisis menggunakan elastisitas bahwa kabupaten yang paling peka terhadap dana desa adalah Kabupaten Pelalawan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan terus melanjutkan program dana desa untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan mengupayakan agar masyarakat tidak kembali mengalami kemiskinan. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan melalui perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan sehingga angka indeks pembangunan manusia dapat semakin meningkat dan mendorong pencapaian tujuan dana desa yang mengentaskan kemiskinan.
2. Untuk pemerintah ataupun instansi terkait kedepan diperlukan kesiapan melalui penguatan kapasitas SDM, selain itu pemerintah juga perlu melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemantauan yang lebih terarah dan berkesinambungan kepada desa. Di sisi lain, diperlukan penguatan koordinasi, konsolidasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat desa.
3. Untuk akademisi ataupun bagi instansi terkait perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk penyempurnaan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data yang akan diteliti dan memperpanjang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan akurat dan bervariasi.

Selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian mengenai seberapa besar dampak dari aspek kebijakan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2020, "*Jumlah Penduduk Miskin (2014-2019) 2020*", BPS Riau. Pekanbaru.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2009, *Statistik Induktif*, BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari, Riana Puji. 2017. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 241 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara,
Pasal 1, Ayat 2.

- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo . *Jurnal Universitas Muhamadiyah Surakarta*.
- Rosalinda. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam (ADD) Menunjang Pembangunan di Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Volume 2. No2.
- Sajogyo. (2007). *Sosiologi Pedesaan* . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Setianingsih. (2016). Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer(Era otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.